

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Petaria Arisa¹

Abstrak

Petaria Arisa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman 2008. Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si. dan Kus Indarto, S.Sos., M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai key informan yang memberikan informasi tentang data yang berhubungan dengan penulis teliti dan informan adalah masyarakat Kota Samrinda yang ditemui di sekitar tempat penyeberanga orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pegawai pelaksana di Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik, tetapi komunikasi dengan instansi lain belum terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia yang dimiliki belum memadai namun telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya finansial mengalami hambatan karena adanya pengurangan anggaran pada tahun 2015.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penyeberangan Pejalan Kaki.*

Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran dalam mendukung pembangunan dan integrasi bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab atas sistem transportasi nasional dan harus dikembangkan potensi dan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : petaria_moet77@gmail.com

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Transportasi berperan penting dalam pembangunan nasional serta berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan di suatu daerah tidak lepas dari prasarana transportasi yang mendukung dalam mendorong distribusi hasil-hasil perdagangan dan komoditi daerah ke antar wilayah hingga mempercepat laju ekonomi masyarakat. Fungsi lalu lintas jalan sebagai komponen dari prasarana transportasi harus menjadi prioritas utama untuk stabilitas pembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk memberikan pelayanan jasa yang efisien, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jalan merupakan suatu sarana transportasi yang sangat penting karena dengan jalanlah maka daerah yang satu dapat berhubungan dengan daerah yang lainnya. Peningkatan arus lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang diatas prasarana transportasi dapat menimbulkan masalah lalu lintas jalan yang sangat rumit, keadaan jalan yang sangat padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah-masalah lalu lintas. Contohnya adalah kemacetan, kecelakaan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, belum lagi ditambah dengan masyarakat yang menyeberang dengan sembarangan tidak pada tempat penyeberangan seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan *Zebra cross* yang tersedia.

Lahirnya Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki adalah sebagai solusi masalah lalu lintas yang dihadapi pada kota-kota besar dan padat untuk dapat menanamkan disiplin, tertib dan aman berlalu lintas agar menekan tingkat kecelakaan, undang- undang yang khusus untuk lalu lintas darat ini dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak terkait, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Berkaitan dengan pentingnya jalur pejalan kaki dalam menyeberang jalan guna menjaga arus lalu lintas yang aman, serta bagaimana gambaran implementasi kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki, oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki, oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk memberi gambaran bagaimana tentang Implementasi Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki oleh

Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. Dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah atau kendala-kendala yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan untuk memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat bahwa pentingnya menyeberang jalan pada tempatnya, demi keselamatan.

2. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan penambahan informasi ilmiah dalam studi kebijakan publik, serta memberikan kontribusi bagi pengetahuan, khususnya pengetahuan yang terkait dengan masalah kebijakan Pemerintah.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Soenarko (2005:43) "Kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat".

Selanjutnya kebijakan menurut Friedrich (dalam wahab, 2008:3) adalah "tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Easton (dalam Abidin, 2006:20) menyebutkan kebijakan sebagai "kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara menyeluruh". Menurut Raksasatya (dalam Lubis, 2007:7) kebijakan adalah "suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, ada tiga unsur dalam kebijakan yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai,
2. Strategi untuk mencapainya,
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Leo (2008:139) menyatakan bahwa fokus analisis implementasi kebijakan berkisaran pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo 2009 :88) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Perpres, Keppres, Permen, Kepmen maupun Perda namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang penting.

Meter dan Horn (dalam Nawawi, 2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian Penyeberangan

Penyeberangan adalah tempat menyeberang (di sungai, jembatan, pelayangan, dan badan jalan). Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 132 tentang penyeberangan pejalan kaki, telah di atur dimana setiap orang yang hendak menyeberang wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Penyeberangan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyeberang, yaitu dimana seseorang melakukan perbuatan menyeberang atau proses seseorang menyeberangi jalan.

Pengertian Pejalan Kaki

Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan diruang lalu lintas jalan, pejalan kaki juga dapat diartikan adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki Kewajiban Pejalan Kaki. Malkamah (1995: 58) mengatakan "agar pejalan kaki mau untuk menggunakan fasilitas penyeberangan seperti : JPO, *Zebra cross* dan lainnya maka harus dijamin keamanan dan jarak berjalan tidak terlalu bertambah jauh". Pejalan kaki harus:

1. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
2. Menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong;
3. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting kerana konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, maka berdasarkan judul penelitian ini, yaitu : Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan kaki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, adalah untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan Kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki tersebut, Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, maka penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Moleong (2005:90) penelitian kualitatif yaitu: “Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh. Dalam hal ini mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan tentang Penyeberangan Pejalan Kaki
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokasi
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Implementasi Kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki.

Sumber dan Jenis Data

Untuk menunjang dan mendukung penelitian yang dilakukan, diperlukan data–data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan yakni :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Adapun data–data tersebut terdiri dari :
 - a. Data hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat yang ditemui di sekitar *Zebra cross* atau jembatan penyeberangan sebagai informan atau narasumber pendukung penelitian.
 - b. Data hasil wawancara dengan Staff Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki, serta faktor–faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki.
 - c. Data dokumentasi penelitian, berupa foto-foto pelaksanaan penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti, dokumen-dokumen laporan, buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan panduan pertanyaan sebagai acuan wawancara kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Untuk itu dalam pengumpulan data juga harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Perpustakaan Penelitian (*Library Research*)

Perpustakaan Penelitian (*Library Research*) yaitu penulisan mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.

2. Penelitian Kerja (*Field Work Research*)

Penelitian kerja (*Field Work Research*) yaitu penulisan mengadakan penelitian langsung lapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

3. Observasi.

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung, yaitu dengan mengamati atau melihat kondisi di lapangan. Kemudian peneliti melakukan pencatatan yang sistematis terhadap kondisi dan kejadian dari yang sudah diamati. Pengamatan disertai dengan pengambilan foto-foto, Sehingga penulis mendapatkan data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- a. Dokumen penelitian (*dokument research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan membaca serta mengambil segala dokumentasi kejadian, seperti foto-foto, arsip, rekaman dan data-data dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang diperlukan. Hal ini untuk membandingkan dengan data hasil wawancara dan pengamatan atau observasi sehingga data akan lebih lengkap dan akurat.
- b. Wawancara yaitu melakukan wawancara secara mendalam kepada informan agar dapat mengumpulkan data yang diperlukan dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan, mengenai Implementasi Kebijakan tentang penyebrangan pejalan kaki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan untuk memperkuat hasil wawancara dari informan utama, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan juga masyarakat agar mendapat data yang diperlukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan sampel dan hipotesis, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang

berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. Maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif melalui data primer dan sekunder.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan A Michael Huberman dalam Sugiyono (2010:247) mengatakan bahwa “Analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Tahap Pengumpulan Data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data peneliti.
2. Tahap Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap Penyajian Data yaitu penyajian informan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
4. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Hasil Penelitian

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba menggambarkan tentang Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Melihat dari model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Nawawi, 2009: 136), menunjukkan empat variable yang berperan penting dalam implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi dari keempat aspek ini lah untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan penyeberangan pejalan kaki yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Nawawi, 2009: 136) Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi kebijakan dan program. Komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama komunikasi dalam proses perencanaan program, yaitu proses penyusunan dan penetapan program pemeliharaan maupun pembuatan sarana penyeberangan pejalan kaki Dinas Perhubungan Kota

Samarinda dalam kaitannya dengan perencanaan setiap tahunnya diadakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan dilakukan mulai tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota. Musyawarah tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengakomodir semua kebutuhan *stakeholder* dalam penyusunan dan penetapan program pemeliharaan maupun pembuatan sarana penyeberangan pejalan kaki. Yang kedua yaitu komunikasi internal organisasi adalah Sebelum menjalankan suatu kegiatan program, dinas melalui bidang yang terkait melakukan komunikasi internal. Komunikasi internal bertujuan agar tujuan dari sebuah program dapat diketahui dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi internal dinas mengenai program yang dijalankan. Yang ketiga yaitu komunikasi eksternal organisasi merupakan komunikasi yang dilakukan dinas kepada sasaran program dan kepada *stakeholder* dalam membantu mencapai tujuan program.

Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Nawawi, 2009 : 136) Sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi sebuah program atau kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendanaan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implementasi tidak akan berjalan efektif

Disposisi

Dalam Edward III (dalam Nawawi, 2009: 136), Disposisi yaitu menunjukkan yang melekat erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program. Kesediaan aparat pelaksana untuk mentaati prosedur yang sudah ditetapkan sesuai petunjuk teknis yang baik, maka kebijakan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur Birokrasi

Dalam Edward III (dalam Nawawi, 2009 : 136), Birokrasi merupakan salah satu faktor yang paling sering, bahkan secara keseluruhan menjadi pengaruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Birokrasi yang dimaksud adalah badan atau lembaga pelaksana kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan birokrasi dalam melakukan kebijakan.

Penyelenggaraan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dalam hal ini inas Perhubungan yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebannya. Organisasi birokrasi tersebut dilibatkan dalam penyelenggaraan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan yang telah diatur.

Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki.

Dalam Edward III (dalam Nawawi, 2009 : 136) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan suatu kebijakan. Sehingga dalam implementasi kebijakan tentang penyeberangan pejalan kaki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengalami hambatan. Yaitu faktor komunikasi yang kurang efektif, mengingat komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam organisasi karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang akan dilakukan. Kemudian dari faktor keterbatasan sumber daya, implementator kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selanjutnya yaitu sikap pelaksana yang tidak tegas Dinas Perhubungan selaku dinas terkait mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang dinilai memiliki karakter kurang tegas dan terlihat tidak mau tau untuk mengambil keputusan terhadap masalah mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang tersebut. hingga sampai saat ini belum ada tindakan dari Dinas Perhubungan. Dengan tidak tersedianya fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang memadai di Kota Samarinda secara maksimal, dan tentunya dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diakibatkan kurang tersedianya fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang berada di Kota Samarinda itu sendiri.

Komunikasi yang Kurang Efektif

Dalam Mazmanian dan Sabatier (dalam Nawawi, 2009:145) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi suatu kebijakan salah satunya adalah komunikasi yang kurang efektif. Dalam menjalankan suatu kebijakan sangat dibutuhkan suatu komunikasi yang baik dan apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik maka akan menyebabkan suatu hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu program yang telah dipersiapkan. Sebelum menjalankan suatu program kebijakan maka bidang maupun dinas yang terkait harus paham mengenai pentingnya fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. Agar kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa *zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang di Kota Samarinda dapat terlaksana dengan baik, maka harus dilaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan kebijakan ini dalam bentuk koordinasi antar sektor dan sosialisasi juga harus dilakukan kepada masyarakat.

Keterbatasan Sumber Daya

Dalam Mazmanian dan Sabatier (dalam Nawawi, 2009:145) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya juga menjadi hal yang menghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Segala bentuk keputusan yang dibuat harus dengan kajian yang matang, jika tidak maka persoalan-persoalan bisa muncul akibat keberadaan jembatan penyeberangan orang yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sikap Pelaksana yang Tidak Tegas

Dalam Mazmanian dan Sabatier (dalam Nawawi, 2009:145) mengungkapkan sikap pelaksana suatu kebijakan tersebut juga sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sehingga pelaksana yang tidak tegas menyebabkan hambatan didalam implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan adanya sikap pelaksana yang tegas dan mampu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sikap pelaksana yang tidak tegas dinas perhubungan selaku dinas yang terkait mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang dinilai memiliki karakter yang kurang tegas dan terlihat tidak mau tau untuk mengambil keputusan terhadap masalah mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang tersebut. Hingga saat ini belum ada tindakan dari dinas perhubungan, dengan tidak tersedianya fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang memadai di kota samarinda secara maksimal, dan tentunya dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diakibatkan kurang tersedianya fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang berada di kota samarinda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa *zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang di Kota Samarinda. Dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa *zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang di Kota Samarinda dinas perhubungan dipengaruhi oleh :
 - a. Komunikasi antar pegawai pelaksana di Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik, tetapi komunikasi dengan instansi lain belum terlaksana dengan maksimal terutama dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terkait dengan menjaga kebersihan sarana jembatan Penyeberangan serta dengan UPTD Pengelola Parkir terkait dengan parkir liar yang menghalangi tangga jembatan penyeberangan di Jalan Gajah Mada.

- b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda meskipun belum memadai namun telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memadai untuk mengimplementasikan kebijakan terkait penyeberangan orang. Sumber daya finansial mengalami hambatan karena adanya pengurangan anggaran pada tahun 2015.
 - c. Disposisi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam melaksanakan kebijakan penyeberangan orang telah memiliki komitmen yang baik.
 - d. Struktur Birokrasi dalam upaya pengorganisasian kegiatan pelaksanaan kebijakan penyeberangan orang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat kekurangan sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan yaitu
 - a. Komunikasi dengan beberapa instansi masih kurang efektif.
 - b. Sumber daya dalam hal ini anggaran atau dana yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kota, akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga di dalam pemeliharaan dan pembangunan *zebra cross* dan jembatan penyeberangan mengalami hambatan.
 - c. Sikap pelaksana yang belum tegas dalam menindak pelanggaran terkait penyeberangan orang baik yang dilakukan oleh penyeberang, pengendara maupun masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di lokasi sekitar jembatan penyeberangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai upaya perbaikan baik kepada instansi yang bersangkutan maupun kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yang akan datang :

1. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan atau mengevaluasi kembali kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa *zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang, mengingat dengan adanya beberapa jembatan penyeberangan orang yang letaknya atau lokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga keberadaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi tata ruang dan keselamatan pengguna jembatan penyeberangan orang.
2. Dinas Perhubungan sebaiknya lebih memiliki sikap tegas dalam upaya menjaga kenyamanan keberadaan jembatan penyeberangan orang dan bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Parkir guna menertibkan juru parkir nakal yang tidak memberikan ruang untuk pejalan kaki yang akan menggunakan jembatan penyeberangan orang di Jl. Gajahmada.
3. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap keberadaan jembatan penyeberangan orang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum harus menggunakan sarana penyebrangan yang telah disediakan guna menjaga keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Daftar Pustaka:

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- C. Edward III, George, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia.\
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynsmic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Islamy, M. Irfan. 2007 *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Askara. Jakarta.
- Jaya, Surya. 1995. *Aman dan Nyaman diJalan*. Jakarta : Cipta Prakarsa Sehati.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Perss.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Perss.
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPF.
- Malkamah, S. 1995. *Manajemen lalu lintas secara terpadu untuk pelestarian lingkungan dan keselamatan lalu lintas*. Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Publik Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : PMN.
- Nugroho, Riand. 2006 *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sadyohutomo, Mulyono . 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta : Bumi Askara.
- Salim, Abbas 1998. *Manajemen transportasi*. Jakarta
- Soenarko, Sd. 2005. *Public policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Welas, Trias. 2010. *Undang-undang Lalu Lintas, UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta : Galangpress.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Askara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan

Sumber Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki diakses pada tanggal 16 april 2015

http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/PenyeSumber:

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2117691-pengertian-sosialisasi/#ixzz2ZtHBaAff> berangan_pejalan_kaki#Zebra_Cross diakses pada tanggal 16 april 2014

http://id.wikibooks.org/wiki/Pembenahan_Transportasi_Jakarta/Fasilitas_Pedestrian. Diakses pada tanggal 28 januari 2014.